MAKALAH

INDONESIA & PERDAMAIAN DUNIA

DISUSUN OLEH:

KELOMPOK 3

- 1. GEORGE CLOONEY**
- 2. OLDIAN MAYTA HUTABARAT**
- 3. PUTRI ANGGI HANDAYANI**
- 4. RYAN SURYA S TURNIP (ketua)**
- 5. SELVIANA SIMBOLON**
- 6. SRI ANRIANI BR GINTING**
- 7. TASYA WULANDARI**
- 8. KATHERINE TAMBUNAN**

POLITEKNIK KESEHATAN MEDAN JURUSAN GIZI

T.A 2019/2020

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA” dengan tepat waktu. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Krista Surbakti S,pd , M,si selaku dosen pembimbing kami yang telah memberikan tugas ini kepada kami sehingga kami mendapatkan banyak tambahan pengetahuan khususnya dalam masalah Perdamaian Dunia di Indonesia

Kami selaku penyusun berharap semoga makalah yang telah kami susun ini bisa memberikan banyak manfaat serta menambah pengetahuan terutama dalam hal mengantisipasi perdamaian dunia.

Kami menyadari bahwa makalah ini masih memiliki banyak kekurangan yang membutuhkan perbaikan, sehingga kami sangat mengharapkan masukan serta kritikan dari para pembaca.

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1. Latar belakang.....	1
2. Rumusan masalah.....	1
3. Tujuan.....	1
BAB II. PEMBAHASAN.....	2
1. Pengertian.....	2
2. Sejarah PBB dan Komitmen.....	2
3. Indonesia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	4
4. Latar belakang terbentuknya misi pemeliharaan Perdamaian PBB.....	6
BAB III. PENUTUP.....	13
1. Kesimpulan.....	13
DAFTAR PUSTAKA.....	14

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perdamaian dunia dilatar belakangi oleh terjadinya perang dunia 1 dan 2 yang dimana pada hal tersebut menyisahkan luka yang mendalam bagi seluruh bangsa dan mengakibatkan banyaknya korban jiwa hal ini merujuk pada hak asasi manusia, dan dari hal tersebut maka seluruh bangsa bahu membahu menyelesaikan pertikaian yang terjadi pada saat itu maka dibentuklah PBB (perserikatan bangsa bangsa)yang dimana tugasnya berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Azasi Manusia. Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta menyediakan forum terhadap 192 negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Azasi Manusia, dan badan-badan serta komite-komite di dalam lingkup PBB.

2. RUMUSAN MASALAH

- 1.BAGAIMANA KOMITMEN INDONESIA TERHADAP PERDAMAIAN DUNIA ?
- 2.BAGAIMANA DIPLOMASI INDONESIA TERHADAP PBB?.
- 3.HAL APA SAJA YANG SUDAH DILAKUKAN INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA?

3. TUJUAN:

- 1.DAPAT MENGETAHUI SEJARAH TERJADINYA PERDAMAIAN DUNIA
- 2.DAPAT MENGETAHUI HUBUNGAN DIPLOMASI INDONESIA DI KANCAH PBB
- 3.DAPAT MENGETAHUI SEJARAH BERGABUNGNYA INDONESIA DENGAN PBB

BAB II. PEMBAHASAN

1. PENGERTIAN

Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara. Melintang di katulistiwa antara benua Asia dan Australia serta antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Indonesia berbatasan dengan Malaysia di utara pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di timur pulau Papua dan dengan Timor Timur di utara pulau Timor.

Indonesia memiliki 18.000 lebih pulau (sekitar 6000 tidak berpenghuni) yang menyebar sekitar katulistiwa, memberikan cuaca tropis. Pulau terpadat penduduknya adalah pulau Jawa, di mana setengah populasi Indonesia hidup. Indonesia terdiri dari 5 pulau besar, yaitu: Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Irian Jaya.

Lokasi Indonesia juga terletak di lempeng tektonik yang berarti Indonesia sering terkena gempa bumi dan juga menimbulkan tsunami. Indonesia juga banyak memiliki gunung berapi, salah satu yang sangat terkenal adalah gunung Krakatau, terletak antara pulau Sumatra dan Jawa.

Perdamaian dunia adalah sebuah gagasan kebebasan, perdamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh negara dan/atau bangsa. Perdamaian dunia melintasi perbatasan melalui hak asasi manusia, teknologi, pendidikan, teknik, pengobatan, diplomat dan/atau pengakhiran seluruh bentuk pertikaian. Sejak 1945, Perserikatan Bangsa-Bangsa dan 5 anggota permanen Majelis Keamanan-nya (AS, Rusia, China, Prancis, dan Britania Raya) bekerja untuk menyelesaikan konflik tanpa perang atau deklarasi perang. Namun, negara-negara telah memasuki sejumlah konflik militer sejak masa itu. Partisipasi Indonesia dalam hal perdamaian dunia didukung Sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia ke 4 disebutkan bahwa “kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan *ikut melaksanakan ketertiban Dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial....*” hal ini merujuk dalam partisipasi Indonesia dalam keikut sertaannya dalam organisasi PBB (PERSERIKATAN BANGSA BANGSA)

2. SEJARAH PBB DAN KOMITMEN

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) didirikan di San Francisco, Amerika Serikat pada 24 Oktober 1945 setelah berakhirnya Perang Dunia II. Namun, Sidang Majelis Umum yang pertama baru diselenggarakan pada 10 Januari 1946 di Church House, London yang dihadiri oleh wakil-wakil dari 51 negara. Saat ini terdapat 192 negara yang menjadi anggota PBB. Semua negara yang tergabung dalam PBB menyatakan independensinya masing-masing.

Sejak didirikan pada tahun 1945, negara-negara anggota PBB berkomitmen penuh untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara, mempromosikan pembangunan sosial, peningkatan standar kehidupan yang layak, dan Hak Azasi Manusia. Dengan karakternya yang unik, PBB dapat mengambil sikap dan tindakan terhadap berbagai permasalahan di dunia internasional, serta menyediakan forum terhadap 192 negara-negara anggota untuk mengekspresikan pandangan mereka, melalui Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Hak Azasi Manusia, dan badan-badan serta komite-komite di dalam lingkup PBB. Sekretaris Jenderal PBB saat ini adalah Ban Ki-moon asal Korea Selatan yang menjabat sejak 1 Januari 2007.

Ruang lingkup peran PBB mencakup penjaga perdamaian, pencegahan konflik dan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga menangani berbagai permasalahan mendasar seperti pembangunan berkelanjutan, lingkungan dan perlindungan pengungsi, bantuan bencana, terorisme, perlucutan senjata dan non-proliferasi, mempromosikan demokrasi, hak asasi manusia, kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, pemerintahan, ekonomi dan pembangunan sosial, kesehatan, upaya pembersihan ranjau darat, perluasan produksi pangan, dan berbagai hal lainnya, dalam rangka mencapai tujuan dan mengkoordinasikan upaya-upaya untuk dunia yang lebih aman untuk ini dan generasi mendatang.

Sekilas Diplomasi Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa

Indonesia resmi menjadi anggota PBB ke-60 pada tanggal 28 September 1950 dengan suara bulat dari para negara anggota. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945, tahun yang sama ketika PBB didirikan dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Oleh sebab itu, banyak negara yang mendaftarkan Indonesia sebagai “truly a child” dari PBB. Hal ini dikarenakan peran PBB terhadap Indonesia pada masa revolusi fisik cukup besar seperti ketika terjadi Agresi Militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam sidang umum PBB.

Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia-Belanda ke meja Perundingan Renville.

Ketika terjadi Agresi militer Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia-Belanda dalam Perundingan Roem Royen.

Pemerintah RI mengutus Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap RI yang pertama di PBB. Duta Besar Palar bahkan telah memiliki peran besar dalam usaha mendapatkan pengakuan internasional kemerdekaan Indonesia pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia pada tahun 1947. Duta Besar Palar memperdebatkan posisi kedaulatan Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada saat itu beliau hanya sebagai "peninjau" di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Pada saat berpidato di muka Sidang Majelis Umum PBB ketika Indonesia diterima sebagai anggota PBB, Duta Besar Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji bahwa Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Posisi Wakil Tetap RI dijabatnya hingga tahun 1953.

Sebagai negara anggota PBB, Indonesia dalam menyelesaikan sengketa Irian Jaya dengan Belanda mengupayakan solusi dengan mengajukan penyelesaian permasalahan tersebut kepada PBB pada tahun 1954. Posisi Indonesia ini didukung oleh Konferensi Asia Afrika pada bulan April 1955 yang mengeluarkan sebuah resolusi untuk mendukung Indonesia dan kemudian meminta PBB untuk menjembatani kedua pihak yang berkonflik dalam meraih solusi damai. Namun demikian, hingga tahun 1961 tidak ada indikasi solusi damai meskipun dalam faktanya isu tersebut dibahas dalam rapat pleno Majelis Umum PBB dan di Komite I.

Pada Sidang Majelis Umum PBB ke-17 tahun 1962, penyelesaian sengketa tersebut akhirnya menemukan titik terang dengan dikeluarkannya Resolusi No. 1752 yang mengadopsi "The New York Agreement" pada 21 September 1962. Selanjutnya, United Nations Executive Authority (UNTEA) sebagai badan yang diberi mandat oleh PBB untuk melakukan transfer kekuasaan Irian Jaya dari Belanda kepada Indonesia menjalankan tugasnya secara efektif mulai 1 Oktober 1962 dan berakhir pada 1 Mei 1963.

3. INDONESIA DAN PERSERIKATAN BANGSA BANGSA

Indonesia resmi menjadi negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa ke-60 pada tanggal 28 September 1950, yang ditetapkan dengan Resolusi Majelis Umum PBB nomor A/RES/491 (V) tentang "penerimaan Republik Indonesia dalam keanggotaan di Perserikatan Bangsa Bangsa",^[1] kurang dari satu tahun setelah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag (23 Agustus - 2 November, 1949).^[1]

Indonesia memiliki perwakilan tetap untuk PBB di New York, sekaligus satu perwakilan tetap untuk PBB, WTO dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa.^[1] Misi di New York dikepalai oleh seorang wakil tetap, sedangkan misi di Jenewa dikepalai oleh seorang duta besar. Pemerintah Republik Indonesia menunjuk Lambertus Nicodemus Palar sebagai Wakil Tetap untuk PBB pertama dari Indonesia. Palar telah memainkan peran penting dalam upaya mencari dukungan dan pengakuan internasional tentang kedaulatan Indonesia pada masa sulit dengan Belanda pada tahun 1947, di mana saat itu Indonesia memiliki status Pengamat dalam Majelis Umum PBB. Berbicara di dalam sidang Majelis Umum PBB pada tahun 1950, Palar berterima kasih untuk setiap dukungan yang diberikan untuk kemerdekaan Indonesia, dan berjanji bahwa negaranya akan melaksanakan tanggung jawabnya sebagai negara anggota dari PBB.

Tanggung jawab dari perwakilan diplomatik Indonesia ini adalah untuk mewakili seluruh kepentingan Indonesia di PBB termasuk dalam berbagai isu keamanan internasional, pelucutan senjata, hak asasi manusia, masalah kemanusiaan, lingkungan hidup, buruh, kerjasama ekonomi dan pembangunan internasional, perdagangan internasional, kerjasama Selatan-Selatan, transferteknologi, hak kekayaan intelektual, telekomunikasi, kesehatan dan meteorologi.

Pengunduran diri dari Perserikatan Bangsa Bangsa (1965-1966)

Pada masa Konfrontasi Indonesia-Malaysia pada 7 Januari tahun 1965, sebagai reaksi atas terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Soekarno marah, Indonesia memutuskan untuk mundur dari PBB, dan mendirikan CONEFO, didukung Republik Rakyat Tiongkok, Republik Demokratik Rakyat Korea, dan Republik Demokratik Vietnam.

Namun, dalam sebuah telegram bertanggal 19 September 1966, Indonesia memberikan pesan kepada Sekretaris Jenderal PBB atas keputusannya "untuk melanjutkan kerjasama penuh dengan Perserikatan Bangsa Bangsa, dan untuk melanjutkan partisipasinya dalam sesi ke-21 sidang Majelis Umum PBB". Pada tanggal 28 September 1966, Majelis Umum PBB menindaklanjuti keputusan pemerintah Indonesia tersebut dan mengundang perwakilan Indonesia untuk menghadiri sidang kembali.

Indonesia menjadi anggota Majelis Umum PBB semenjak tahun 1951.^[1] Indonesia pernah sekali ditunjuk sebagai Presiden Majelis Umum PBB pada tahun 1971, yang pada saat itu diwakili oleh Adam Malik yang memimpin sesi ke 26 sidang Majelis Umum PBB. Ia merupakan perwakilan Asia kedua yang pernah memimpin sidang tersebut setelah Dr. Carlos Pena Romulo dari Filipina.

Dewan Keamanan PBB

Indonesia telah terpilih sebanyak empat kali sebagai anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB. Indonesia pertama kali dipilih untuk periode 1974-1975. Indonesia kemudian dipilih kembali untuk kedua kalinya pada periode 1995-1996 lalu untuk ketiga kali pada periode 2007-2008 dan keempat kalinya pada periode 2019-2020 . Dalam masa jabatannya yang ketiga, Indonesia dipilih oleh 158 suara dari 192 negara anggota yang melakukan pemungutan suara di Majelis Umum PBB pada saat itu. Pada masa jabatan keempat, Indonesia mendapat 144 suara dari 190 negara yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia bersaing dengan Maladewa yang mendapatkan 46 suara, tidak ada yang abstain.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB

Indonesia menjadi anggota Dewan Ekonomi dan Sosial PBB untuk periode-periode 1956-1958, 1969-1971, 1974-1975, 1979-1981, 1984-1986, 1989-1991, 1994-1996, 1999-2001, 2004-2006, 2007-2009 dan 2012-2014. Indonesia pernah dipilih dua kali sebagai Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1970 dan 2000, dan dipilih sebagai Wakil Presiden Dewan Ekonomi dan Sosial PBB pada tahun 1969, 1999 dan 2012.^[1] Pada masa jabatannya untuk tahun 2012-2014, Indonesia menjadi anggota dewan tersebut dengan mendapatkan suara terbanyak dibandingkan dari negara-negara Asia lainnya yang diambil pada sesi Majelis Umum PBB pada 24 Oktober 2011 di New York.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Indonesia telah terpilih sebanyak tiga kali sebagai anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB semenjak dewan tersebut dibentuk pada tahun 2006. Indonesia menjadi anggota dalam periode 2006-2007, 2007-2010 dan 2011-2014.^[1] Indonesia sekali menjadi Wakil Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2009-2010, diwakili oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani.

Peran Indonesia Dalam Misi Garuda Perdamaian Dunia Indonesia selalu berkomitmen untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini merupakan amanat dari alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu bentuk perwujudan komitmen ini adalah peran Indonesia dalam Misi Garuda.

4. Latar Belakang Terbentuknya Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB

Misi Garuda tidak terlepas dari terbentuknya United Nations Peacekeeping Operations (Misi Pemeliharaan Perdamaian PBB/ MPP PBB). MPP PBB adalah “flagship enterprise” PBB yang dibentuk sebagai “alat” PBB untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Berdasarkan data UN DPKO per 31 Oktober 2018, tercatat lebih dari 100.000 personel dari 124 negara yang diterjunkan di 14 MPP PBB. Mereka berasal baik dari unsur militer, polisi, maupun sipil. Total anggaran MPP PBB untuk periode Juli 2018 hingga Juni 2019 mencapai USD 6,69 milyar.

Peran MPP PBB pada awalnya hanya terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi situasi di lapangan. Hal ini untuk memberikan ruang bagi usaha-usaha politik dalam menyelesaikan konflik. Namun, saat ini tugas dari MPP PBB menjadi semakin luas. Mayoritas MPP PBB sebelumnya dihadapkan pada konflik antar negara, tetapi kini juga dituntut untuk dapat diterjunkan pada berbagai konflik internal dan perang saudara. MPP PBB juga bahkan dihadapkan pada meningkatnya konflik yang bersifat asimetris, ancaman kelompok bersenjata, terorisme dan radikalisme, serta penyakit menular. Baca juga penyebab Perang Dingin, negara yang terlibat Perang Dunia 2, kronologi Perang Dunia 2, dan akhir Perang Dunia 2.

Latar Belakang Terbentuknya Misi Garuda

Misi Garuda merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia dalam melaksanakan MPP PBB. Misi Garuda adalah pasukan yang terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Pembentukan Pasukan Garuda diawali dengan munculnya konflik di Timur Tengah pada 26 Juli 1959. Tiga negara yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Mesir. Hal ini pun akhirnya menimbulkan perdebatan diantara negara-negara lainnya.

Menteri Luar Negeri Kanada saat itu, Lester B. Perason, mengusulkan dibentuknya pemelihara perdamaian di Timur Tengah dalam Sidang Umum PBB. Usulan tersebut pun disetujui, sehingga pada tanggal 5 November 1956, Sekretaris Jenderal PBB membentuk United Nations Emergency Forces (UNEF).

Indonesia menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam UNEF. hingga saat ini Indonesia telah mengirimkan Misi Garuda I sampai Misi Garuda XXVI-C2. Menurut data Kementerian Luar negeri pada 21 Maret 2016, Indonesia pun menjadi contributor terbesar ke-10 untuk Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB dari 124 negara.

Latar Belakang Indonesia Mengirimkan Pasukan Garuda ke Mesir

Meskipun Indonesia tidak hanya mengirimkan Pasukan Garuda ke Mesir saja, tetapi ada alasan khusus mengapa Indonesia menyatakan kesediaannya memelihara perdamaian di Timur Tengah. Saat Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Mesir segera menyelenggarakan sidang menteri luar negeri negara-negara Liga Arab. Pada 18 November 1946, Liga Arab menetapkan resolusi pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Hal ini menjadi pengakuan *de jure* menurut hukum internasional.

Sekretaris Jenderal Liga Arab saat itu, Abdurrahman Azzam Pasya, mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, yakni Mohammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia. Ia sampai ke Yogyakarta, ibu kota RI saat itu, setelah menempuh perjalanan panjang dan penuh rintangan terutama dari pihak Belanda. Utusan Mesir diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Moh. Hatta pada 15 Maret 1947. Peristiwa ini merupakan bentuk pengakuan pertama atas kemerdekaan RI oleh negara asing.

Indonesia bahkan membuka Perwakilan RI di Mesir dengan menunjuk HM Rasyidi sebagai Kuasa Usaha. Perwakilan RI tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Kedekatan hubungan ini memberi makna pada perjuangan Indonesia saat terjadi perdebatan di forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membahas sengketa Indonesia-Belanda. Para diplomat Arab pun dengan gigih mendukung Indonesia.

Presiden Soekarno membalas hal tersebut dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada Mei 1956 serta Irak pada April 1960. Indonesia juga mendukung keputusan Majelis Umum PBB untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir. Pada akhirnya, Indonesia untuk pertama kalinya mengirim Pasukan Pemeliharaan Perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan Kontingen Garuda I atau KONGA I. Baca juga penyebab Perang Yaman dan Arab Saudi dan penyebab Perang Israel dan Palestina.

Peran Indonesia dalam Misi Garuda

Peran Indonesia dalam Misi Garuda diwujudkan dengan dikirimkannya Kontingen Garuda ke berbagai negara. Rincian dari peran Kontingen Garuda (KONGA) beserta misi yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. KONGA I dikirim tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir yang terdiri dari 559 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri Hartoyo yang kemudian digantikan Letnan Kolonel Infanteri Suadi Suromihardjo.
2. KONGA II dikirim pada 1960 ke Kongo yang terdiri dari 1.074 pasukan. Pasukan dipimpin oleh Kol. Prijatna dan digantikan oleh Letkol Solichin G.P.
3. KONGA III dikirim pada 1962 ke Kongo yang terdiri atas 3.475 pasukan. KONGA III di bawah misi UNOC dan dipimpin oleh Brigjen TNI Kemal Idris dan Kolonel Infanteri Sobirin Mochtar.
4. KONGA IV dikirim pada 1973 ke Vietnam. Pasukan ini berada di bawah misi ICCS dan dipimpin oleh Brigjen TNI Wiyogo Atmodarminto.
5. KONGA V dikirim ke Vietnam pada 1973 di bawah misi ICCS. Pasukan dipimpin oleh Brigjen TNI Harsoyo.
6. KONGA VI dikirim ke Timur Tengah pada 1973 di bawah misi UNEF. Pasukan dipimpin oleh Kolonel Infanteri Rudini.
7. KONGA VII pada 1974 dikirim ke Vietnam di bawah misi ICCS. Pasukan ini dipimpin oleh Brigjen TNI [[S. Sumantri]] dan digantikan oleh Kharis Suhud.
8. KONGA VIII dikirim ke Timur Tengah pada 1974 dalam rangka misi perdamaian PBB di Timur Tengah. Pengiriman pasukan dilakukan paska Perang Yom Kippur antara Mesir dan Israel.
9. KONGA IX dikirim ke Iran dan Irak pada tahun 1988. KONGA IX berada di bawah misi UNIIMOG.
10. KONGA X dikirim pada 1989 ke Namibia. Pasukan ini berada di bawah misi UNTAG dan dipimpin oleh Kol Mar Amin S.
11. KONGA XI dikirim ke Irak-Kuwait pada 1992 di bawah misi UNIKOM.
12. KONGA XII dikirim ke Kamboja pada 1992 di bawah misi UNTAC.
13. KONGA XIII dikirim ke Somalia pada 1992 di bawah misi UNOSM dan dipimpin oleh May Mar Wingky S.
14. KONGA XIV dikirim ke Bosnia-Herzegovina pada 1993 di bawah misi UNPROFOR.
15. KONGA XV dikirim ke Georgia pada 1994 di bawah misi UNIMOG dan dipimpin oleh May Kav M. Haryanto.
16. KONGA XVI dikirim ke Mozambik pada 1994 di bawah misi UNOMOZ dan dipimpin oleh May Pol Drs Kuswandi.

17. KONGA XVII dikirim ke Filipina dpada 1994. Pasukan ini dipimpin oleh Brgjen TNI Asmardi Arbi.
18. KONGA XVIII dikirim ke Tajikistan pada November 1997 dan dipimpin oleh Mayor Can Suyatno.
19. KONGA XIX dikirim ke Sierra Leone pada 1999-2002 yang bertugas sebagai misi pengamat.
20. KONGA XX dikirim ke Republik Demokratik Kongo pada tahun 2003.
21. KONGA XXI dikirim ke Liberia mulai tahun 2003. Pasukan ini terdiri dari perwira AD, AL, dan AU yang terlatih dalam misi PBB dan memiliki kecakapan khusus sebagai pengamat militer.
22. KONGA XXII dikirim ke Sudan pada 9 Februari 2008 sebagai pengamata militer dan juga berkontrbusi untuk UNAMID (Darfur).
23. KONGA XXIII bertugas di Lebanon (UNIFIL) dan sempat ditunda keberangkatannya pada akhir September 2006.
24. KONGA XXIV bertugas di Nepal (UNMIN) mulai tahun 2008.
25. KONGA XXV bertugas di Lebanon mulai tahun 2008 dan sudah melakukan 11 kali rotasi hingga 2019.
26. KONGA XXVI bertugas di Lebanon pertama kali pada tahun 2008 untuk melaksanakan tugas sebagai satuan FHQSU dan INDO FP Coy.
27. KONGA XXVII tergabung dalam misi UNAMID di Darfur dan bertugas mulai tanggal 21 Agustus 2008.
28. KONGA XXVIII dikirim pada 16 Maret 2009 untuk bergabung dalam MTF UNIFIL.
29. KONGA XXIX dikirim ke Lebanon pada 29 Desember 2009 untuk memberikan dukungan kesehatan kepada personel UNIFIL maupun humanitarian.
30. KONGA XXXI dibentuk untuk memelihara citra UNIFIL di mata masyarakat Lebanon. Indonesia mengirimkan pasukannya sejak tahun 2010.
31. KONGA XXX bertugas sejak bulan Juli 2011 dengan nama Satgas MCOU XXX-A/UNIFIL.

4 Negara Berkonflik yang Berhasil Didamaikan Indonesia

Jakarta - Indonesia ikut berperan aktif dalam perdamaian negara-negara yang mengalami konflik. Salah satunya merencanakan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Wakil Menlu A.M Fachir sempat berkunjung ke Paris pada 14 dan 15 Januari 2017, dalam rangka

merundingkan solusi terkait konflik Palestina-Israel.

Sekarang, Indonesia menawarkan tempat untuk pertemuan antara Korea Utara dan Amerika Serikat. Tak sampai disitu, masih banyak peran Indonesia untuk berupaya menciptakan perdamaian negara-negara konflik.

Seperti dikutip dari berbagai sumber, berikut beberapa negara yang berutang budi pada Indonesia karena berhasil berdamai:

1) Thailand Berdamai saat Era Soeharto

Perdamaian Thailand berawal pada awal periode 1980-an, saat Presiden Filipina Ferdinand Marcos berusaha mencari dukungan dari negara-negara Timur Tengah dan Indonesia untuk menyelesaikan konflik dengan Bangsa Moro di Mindanao. Saat itu Moro ingin merdeka dan memisahkan diri dari Filipina.

Marcos bertemu dengan Soeharto di Jakarta, meminta penyelesaian soal Moro agar tetap menjadi bagian Filipina. Soeharto menerima permintaan Marcos. Indonesia setuju untuk mendamaikan konflik dengan syarat Bangsa Moro tetap menjadi bagian dari Filipina.

Langkah perdamaian ini diteruskan oleh pengganti Marcos, Presiden Corazon Aquino. Tahun 1989, disepakati otonomi daerah istimewa untuk kawasan Muslim Mindanao. Namun hal itu tak lantas membuat konflik selesai.

23 September 1993, Presiden Fidel Ramos mengunjungi Presiden Soeharto di Jakarta. Kembali meminta bantuan untuk menyelesaikan konflik di Mindanao.

Indonesia kemudian membawa masalah Mindanao ke Forum Menteri Luar Negeri Negara Muslim. Dibentuk Komite Enam, dengan Indonesia sebagai ketuanya.

"Indonesia dipilih karena menjadi negara Muslim terbesar, punya kepemimpinan yang kuat di kawasan ASEAN dan punya pengalaman menengahi konflik di Kamboja." Demikian ditulis Anak Agung Banyu Perwita dalam buku *Indonesia And The Muslim World*.

Tak mudah menyelesaikan konflik pemerintah Filipina dengan Bangsa Moro. Indonesia selalu terlibat sebagai fasilitator. Akhirnya perjanjian damai bisa diteken antara kedua pihak tahun 1996.

2) Konflik Perbatasan Thailand dan Kamboja

Paparan ini disampaikan oleh pemimpin rapat, Tantowi Yahya. Di paparan itu, Tantowi yang mewakili komisi satu menggaris bawahi sejumlah pencapaian yang berhasil direngkuh kemlu, Jakarta, Rabu (17/9/2014) (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Indonesia sebagai ketua ASEAN menggelar Informal ASEAN Foreign Minister's Meeting (pertemuan informal para Menlu ASEAN) dengan agenda tunggal pembahasan penyelesaian konflik Thailand dan Kamboja. Konflik kedua negara terjadi di satu kuil kuno di perbatasan kedua negara yang disengketakan.

Dalam pertemuan itu membahas perdamaian Thailand dan Kamboja. Indonesia sebagai mediator tercapai ketika Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mampu mendamaikan kedua negara di PBB pada 14 Februari 2011.

Marty melakukan "shuttle diplomacy" menemui Menlu Kamboja Hor Nam Hong di Phnom Penh dan Menlu Thailand Kasit Piromya di Bangkok untuk mendapatkan informasi dari pihak pertama. Bersama-sama dengan Menlu Thailand dan Kamboja, Menlu Marty pun ke New York untuk memberikan pertimbangan dan masukan mengenai peran ASEAN dalam menyelesaikan konflik internal di kawasan. Langkah ini terbukti efektif dengan stabilnya kembali wilayah konflik di perbatasan Thailand dan Kamboja.

Menanggapi langkahnya, Menlu Marty mengatakan "sejak awal ia menghindari adanya kevakuman pada tingkat kawasan yang memerlukan intervensi secara langsung oleh DK PBB. Kini, sebaliknya, keterlibatan DK PBB adalah dalam rangka mendukung upaya Indonesia selaku Ketua ASEAN."

3) Konflik Kamboja dan Vietnam

Seorang peserta 'Aksi Kita Indonesia' ikut membentangkan Bendera Merah Putih raksasa di Bundaran HI, Jakarta, Minggu (4/12). Aksi Kita Indonesia adalah acara perayaan kegembiraan atas keberagaman dan kebangsaan Indonesia. (Liputan6.com/Fery Pradolo)

Pada tahun 1988 sampai 1989, Indonesia pernah menjadi tuan rumah Jakarta Informal Meeting (JIM) untuk menyelesaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam.

Pada saat itu Indonesia berhasil memfasilitasi dan memediasi kedua negara yang sedang bermusuhan untuk bisa duduk bersama-sama mendiskusikan dan menyelesaikan konflik diantara mereka.

Hasilnya, Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja dan situasi damai di Kamboja tercipta.

4) Konflik Etnis Rohingya dengan Myanmar

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi menemui Menlu Myanmar, Aung San Suu Kyi di ibu kota Naypyidaw, Senin (4/9). Kedatangan Menlu Retno itu membawa misi dari Presiden Jokowi guna membicarakan krisis kemanusiaan Rohingya. (Myanmar Foreign Ministry via AP)

Konflik yang masih terjadi hingga menjadi perbincangan luar negeri adalah konflik etnis Rohingya dengan Myanmar. Banyak yang beranggapan bahwa pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi tak banyak berperan dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Indonesia turut membantu menyelesaikan masalah ini. Sudah beberapa kali Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengunjungi Myanmar dan Bangladesh untuk membicarakan perdamaian Myanmar dengan Rohingya.

Pada 4 September 2017, Menteri Retno mendesak pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar untuk membuka akses masuk bagi pemberian bantuan kemanusiaan untuk mengatasi krisis yang terjadi di Rakhine State. Salah satu pejabat yang ditemui Menteri Retno adalah Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, Jenderal Senior U Min Aung Hlaing. Menlu menyampaikan bahwa penurunan ketegangan di Rakhine State harus menjadi prioritas pemerintah Myanmar.

Menteri Retno juga bertemu dengan Suu Kyi di Myanmar pada 5 September 2017 untuk membawa amanah dari masyarakat Indonesia dan dunia internasional terkait krisis kemanusiaan yang dialami muslim Rohingya yang mendapat penyiksaan militer Myanmar.

Menlu Retno menyampaikan usulan Indonesia yang disebut Formula 4+1 untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Myanmar. Pertama, mengembalikan stabilitas dan keamanan. Kedua, agar militer Myanmar menahan diri dan tidak menggunakan kekerasan.

Ketiga, mendorong pemerintah Myanmar memberikan perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine State tanpa memandang suku dan agama. Keempat, membuka akses untuk bantuan keamanan.

"Elemen utama yang harus segera dilakukan agar krisis kemanusiaan dan keamanan tidak semakin memburuk," jelas Retno.

BAB III. PENUTUP

1.Kesimpulannya

bahwa Indonesia berpartisipasi dalam terciptanya perdamaian dunia hal ini telah terwujud dalam penyelesaian konflik yang berhasil diselesaikan Indonesia dalam makalah yang kami tulis dan Indonesia juga berpartisipasi dalam misi pemeliharaan perdamaian dunia dengan mengirim kontingen Garuda ke berbagai Negara, dan juga Indonesia berhasil ditunjuk menjadi beberapa dewan di PBB (PERSERIKATAN BANGSA BANGSA).

DAFTAR PUSTAKA

Budi, J. (2017). INDONESIA DAN PERDAMAIAN DUNIA SECARA UMUM, 20-102

[HTTPS://ID.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PERDAMAIAN_DUNIA](https://id.wikipedia.org/wiki/Perdamaian_Dunia)

[HTTPS://SEJARAHLENGKAP.COM/INDONESIA/PERAN-INDONESIA-DALAM-MISI-GARUDA](https://sejarahlengkap.com/indonesia/peran-indonesia-dalam-misi-garuda)

[HTTPS://ID.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/PERSERIKATAN_BANGSA-BANGSA](https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa)

Megastri. W. (2016). HUBUNGAN SATU NEGARA DENGAN NEGARA YANG LAIN DALAM DEMOKRASI MODEREN, 20(29).

Surbakti, K. (2018). FOSTERING OF FEMALE PRISONERS IN TANJUNG GUSTI PENITENTIARY OF MEDAN. *PROCEEDING: THE DREAM OF MILLENNIAL GENERATION TO GROW*, 216-225.

Surbakti, K., & Si, M. (2019). KAJIAN MENGENAI PENTINGNYA BASIS DATA BAGI SEKOLAH SAAT INI. *JURNAL CURERE*, 2(2).

Utomo, L (2017). NEGARA DAN KONSTITUSI, 01-30.